



PEMANGKASAN ANGGARAN RP 61 MILIAR Berdampak Program Infrastruktur Tahun 2025

WONOSARI (KR) - Pemkab Gunungkidul menghadapi tantangan berkaitan dengan adanya pemangkasan anggaran sebesar Rp 61 miliar yang diperkirakan akan berdampak pada sejumlah program pembangunan, khususnya di sektor infrastruktur. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Gunungkidul, Putro Sapto Wahyono, mengungkapkan bahwa pemangkasan tersebut terjadi setelah diterbitkannya Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 29 Tahun 2025 bahwa dana yang dialokasikan untuk daerah, khususnya Dana Alokasi Khusus (DAK) sektor fisik dan infrastruktur, mengalami pengurangan. Adapun rincian pemangkasan anggaran untuk DAK Fisik berkurang sebesar Rp 42,6 miliar, sementara DAK Infrastruktur turun hingga Rp 18,9 miliar. "Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Pemkab diwajibkan menghemat anggaran dengan kisaran Rp 61 miliar," katanya.

Proses efisiensi masih dilakukan, dan pihaknya belum bisa menyebutkan secara pasti berkaitan program infrastruktur yang terkena dampak kebijakan

tersebut. Karena hingga saat ini masih terus dikaji dan didalami yang dipangkas dari total DAK yang diberikan juga belum dihitung. Karena prosesnya masih berlangsung. Untuk dampak secara langsung dari pemangkasan ini dirasakan pada berbagai program pembangunan yang sudah direncanakan terutama bidang infrastruktur jalan, pengembangan sumber daya manusia (SDM), serta sektor pertanian dan perikanan. "Pemangkasan ini tentu akan mempengaruhi kelancaran program yang sudah dirancang. Karena itu kami sedang mencari cara untuk menyesuaikan," ujarnya.

Kepala DPUPRKP Gunungkidul, Rakhmadian Wijayanto mengatakan, kebijakan pemangkasan anggaran untuk DAK fisik memang ada. Kendati demikian, untuk besaran masih menunggu kebijakan dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Gunungkidul. Pihaknya sudah konsultasi dengan Kementerian dan benar akan ada pemangkasan. "Tetapi, jumlah pastinya menunggu kebijakan dari bupati lebih lanjut," katanya. **(Bmp)**